



KR-Sukro Riyadi

MULAI PANEN: Petani di Kalurahan Trimulyo, Kapanewon Jetis, Kabupaten Bantul, mulai memanen padi, Senin (29/11). Berdasarkan data Dinas Pertanian, Pangan, dan Kelautan Kabupaten Bantul, setiap tahun lahan untuk budidaya padi mencapai 27.000 hektare lebih dengan produktivitas kisaran 6,3 ton/hektare gabah kering panen.

BERKAS PERKARA SUDAH DILIMPAHKAN Azis Syamsuddin Menunggu Disidangkan

JAKARTA (KR) - Jaksa penuntut umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara terdakwa mantan Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta. Plt Juru Bicara KPK Ali Fikri mengatakan, pelimpahan berkas tersebut dilakukan, Senin (29/11).

"Pelimpahan berkas perkara Azis Syamsuddin dilakukan jaksa KPK Yoga Pratomo ke Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat," jelas Ali Fikri dalam keterangannya, Selasa (30/11).

Azis Syamsuddin adalah terdakwa perkara dugaan suap terkait penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Kabupaten Lampung Tengah Lampung. Kini, kata Ali, dengan telah dilimpahkannya berkas perkara Azis, maka penanganan selanjutnya beralih dan menjadi wewenang dari pengadilan tipikor.

Sementara tim jaksa, lanjutnya, masih menunggu penetapan penunjukan majelis hakim yang akan memimpin jalannya persidangan. "Selain itu, menunggu penetapan hari sidang dengan agenda awal pembacaan surat dakwaan oleh tim jaksa," ucap Ali.

Dalam perkara ini, menurut Ali, Azis dijerat dengan dakwaan pertama Pasal 5 ayat (1) huruf a Undang-Undang Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP atau kedua Pasal 13 Undang-

Undang Tipikor jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Sebelum dilimpahkan ke Pengadilan Tipikor, KPK menyerahkan barang bukti dan tersangka mantan Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin (AZ) kepada tim jaksa penuntut agar dapat segera disidangkan. Penyerahan itu dilakukan tim penyidik kepada tim jaksa karena berkas perkaranya dinyatakan lengkap.

Terkait hal itu, Ali sebelumnya mengatakan, penahanan terhadap Azis dilanjutkan tim jaksa untuk waktu 20 hari ke depan terhitung sejak 22 November sampai dengan 11 Desember 2021 di Rutan KPK pada Kavling C1 Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK Jakarta. Namun, dengan dilimpahkannya ke Pengadilan Tipikor, penahanan Azis menjadi wewenang pengadilan.

Dalam konstruksi perkara dugaan suap ini, KPK menjelaskan Azis menghubungi penyidik KPK saat itu Stepanus Robin Pattuju dan meminta tolong mengurus kasus yang melibatkannya dan Aliza Gunado yang sedang dilakukan penyelidikan oleh KPK.

Aliza merupakan kader Partai Golkar yang pernah menjabat sebagai mantan Wakil Ketua Umum PP Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG). Selanjutnya, Robin menghubungi adovokat Maskur Husain untuk ikut mengawal dan mengurus perkara tersebut. **(Ful)-f**

DIAWALI BUKA PAMERAN 'JABAR MOTEKAR' Ridwan Kamil Silaturahmi Kebudayaan di DIY

YOGYA (KR) - Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil melakukan kunjungan ke DIY selama dua hari, Rabu-Kamis (1-2/12). Pria yang akrab disapa Kang Emil itu akan mengikuti serangkaian agenda kegiatan kebudayaan dan ekonomi kreatif (ekraf) di DIY.

Pada Rabu (1/12) pukul 13.00, Kang Emil akan membuka pameran 'Jabar MOTEKAR' di Jogja National Museum (JNM), Jalan Prof Dr Ki Amri Yahya No 1 Yogyakarta. Pembukaan pameran produk ekraf Jabar dan lukisan karya Kang Emil itu dihadiri GKR Bendera. Pameran akan berlangsung sepekan hingga Selasa (7/12).

"Selain produk ekraf dan karya seniman Jabar, sebanyak 20 lukisan karya Kang Emil yang telah dikurasi juga akan dipamerkan. Selama pandemi, Kang Emil cukup produktif melukis," kata Kabid Informasi dan Komunikasi Publik Diskominfo Jabar Faiz Rahman, saat silaturahmi di Redaksi KR, Selasa (30/11) petang, diterima oleh Redaktur Pelaksana KR Primawolo Sudjono.

Malam harinya, Kang Emil akan mengadakan *joint session* bersama Gubernur



KR-Basuki Rahardjo
Faiz Rahman

DIY Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam acara Pesona Budaya Jabar-Yogyakarta yang digelar di di Resto Rama Shinta Kompleks Candi Prambanan, Rabu pukul 19.00.

Agenda kebudayaan ini untuk lebih memperkuat silaturahmi dan hubungan Jabar-DIY yang sudah terjalin lama. "Kedua daerah mempunyai kesamaan terkait produktivitas dalam hal

ekraf, kekayaan seni budaya, maupun pariwisata. Rencananya, pekan depan Sultan akan mengadakan kunjungan balasan ke Bandung, Jabar," jelas Faiz.

Pada Kamis (2/12) pukul 10.00-12.00, Kang Emil diundang sebagai pembicara dalam 'Fisipol Leadership Forum: Road to 2024' Seri #1 yang digelar di Auditorium Mandiri Lantai 4 Fisipol Universitas Gadjah Mada. Diskusi juga ditayangkan *live* di YouTube Channel Fisipol UGM.

Pada Kamis pukul 13.00, Kang Emil menghadiri acara *Content Creator Gathering* di Kompleks Candi Prambanan. Agenda tersebut disertai pertemuan dengan Forum Pemred di DIY, di mana mereka bisa berdiskusi langsung dengan Kang Emil. **(Bro)-f**

DILARANG CUTI NATARU

Melanggar, ASN Dikenai Sanksi

JAKARTA (KR) - Pemerintah mewajibkan Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak mengambil cuti pada Desember 2021 ini. Pihak keluarga ASN dan masyarakat umum diharapkan dapat memberikan dukungan implementasi salah satu kebijakan untuk mengendalikan Covid-19 di masa liburan Natal dan Tahun Baru (Nataru) ini.

"Kami berharap para ASN dan semua pihak terkait dapat memahami bahwa kebijakan ini semata diambil untuk mendukung pengendalian Covid-19 di Indonesia. Kami berharap tidak ada pelanggaran, sehingga sanksi tegas yang sudah disiapkan tidak perlu diberikan kepada ASN manapun," ujar Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G Plate di Jakarta, Selasa (30/11).

Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (SE Menpan-RB No 13 Tahun 2021) menyebutkan, ASN dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah di minggu yang sama dengan hari libur nasional baik sebelum maupun sesudah 20 Desember 2021. Berdasarkan SE Menpan-RB No 26 Tahun

2021 ASN juga dilarang mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah selama periode Hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022, yakni 24 Desember 2021-2 Januari 2022.

"Dengan demikian, ASN tidak diperkenankan untuk mengambil cuti dan bepergian ke luar daerah sepanjang 20 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Salah satu kebijakan pencegahan penularan Covid-19 ini juga akan diikuti dengan aturan ganjil genap di seluruh tempat wisata yang akan berlaku sejak Operasi Lilin 2021, yaitu 20 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022," papar Menkominfo.

Menurut Menkominfo, hal ini sebagai langkah pencegahan dan penanggulangan Covid-19 yang berpotensi meningkat dikarenakan perjalanan orang selama Nataru. Pemerintah juga mengimbau seluruh ASN untuk tetap waspada dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan. Pemerintah mengajak semua pihak sama-sama saling mengingatkan bahwa pandemi Covid-19 belum selesai. "Sejumlah aturan disiapkan bagi ASN dalam menghadapi Nataru," tambahnya. **(San)-f**

PAGUYUBAN ANGKRINGAN KEBERATAN

Relokasi PKL Malioboro Awal 2022

YOGYA (KR) - Meski sempat muncul pro kontra, relokasi pedagang kakilima (PKL) dari kawasan Malioboro terus dipersiapkan. Salah satunya menata dan mempersiapkan dua titik lokasi baru PKL Malioboro, yakni eks Gedung Bioskop Indra dan eks Gedung Dinas Pariwisata DIY di Kawasan Malioboro. Ditargetkan proses pemindahan bisa dilakukan awal 2022 nanti.

"Mudah-mudahan relokasi bisa dimulai Januari 2022 mendatang. Karena PKL diminta segera menyiapkan diri. Apalagi saat ini bangunan eks Bioskop Indra sudah siap ditempati PKL dan pedagang kuliner. Sedangkan bangunan eks Dinas Pariwisata baru disiapkan agar bisa rampung secepatnya," ungkap Kepala Dinas Koperasi dan UKM DIY Srie Nurkatsiwi di Yogyakarta, Selasa (30/11).

Relokasi dilakukan untuk menata kawasan Malioboro sebagai bagian dari Program Sumbu Filosofi sebagai Warisan Budaya Dunia ke UNESCO tersebut dikerjakan bersama Pemkot Yogyakarta dan Pemda DIY.

Siwi mengatakan, pihaknya terus melakukan kajian dan koordinasi agar pedagang yang dipindah tidak mengalami kerugian dan pengunjung tetap nyaman. Relokasi dilakukan demi ke-

nyamanan pelaku usaha dan pengunjung kawasan Malioboro. Apalagi lokasi relokasi juga lebih permanen. Dengan pendataan diharapkan bisa pula diketahui PKL yang memiliki izin berjualan di Malioboro. Karena relokasi tersebut bagi PKL yang mengantongi izin. Dua lokasi itu diperkirakan bisa menampung sekitar 1.800 PKL.

"Selain pendataan PKL berizin, skema dan strategi agar lokasi baru menarik wisatawan dan pengunjung Malioboro sedang disusun," katanya.

Ketua Paguyuban Angkringan Malioboro (Padma) Yati Dimanto keberatan dengan rencana relokasi PKL kawasan Malioboro. PKL lebih memilih ditata tanpa dipindah meskipun masih berada di Malioboro. Kebijakan relokasi ini dinilai diputuskan secara sepihak tanpa melibatkan Paguyuban PKL dan dalam kondisi tersulit sebagai

dampak pandemi Covid-19.

"Kami bersama Paguyuban PKL di kawasan Malioboro lainnya sebagian besar telah menyatakan keberatan dengan relokasi tersebut. Kami memilih ditata daripada pindah karena menimbang dampak buruk sosial dan ekonomi yang sangat mungkin terjadi. Kondisi kami sedang susah, baru bangun dari mati suri dan tidur panjang, belum lagi berjalan ada kebijakan relokasi," paparnya.

Yati menyampaikan, PKL diizinkan berjualan di sisi Timur maupun Barat kawasan Malioboro sudah sangat lama, bahkan telah menjadi daya tarik tersendiri dan ikon Malioboro. Disayangkan tiba-tiba ada kabar relokasi. Pemkot Yogyakarta bahkan baru pada tahapan sosialisasi dan pendataan.

Wakil Ketua Paguyuban Handayani Sukino mengaku terkejut terhadap rencana relokasi ini. Bahkan, pihaknya baru dapat informasi Kamis (25/11) melalui telepon. Rencananya PKL akan dipindah ke gedung baru eks Bioskop Indra dan diminta menempati shelter di dekat Grand Inna Malioboro terlebih dahulu. "Kami sangat keberatan direlokasi. Kami juga menyayangkan diberitahu mendadak," katanya. **(Ria/Ira)-f**

21 Februari 2024, Dinilai Tepat untuk Pemilu

JAKARTA (KR) - Anggota KPU RI Pramono Ubaid Tanthowi mengapresiasi sekaligus bersyukur terkait hari pemungutan suara Pemilu Serentak 2024 yang diajukan KPU dinilai merupakan pilihan paling tepat.

"KPU telah mendengar masukan dari banyak pihak. Semua pihak pada akhirnya melihat, bahwa tanggal yang diajukan KPU (21 Februari 2024) merupakan pilihan paling tepat," kata Pramono Ubaid Tanthowi di Jakarta,

Selasa (30/11).

Selain itu, Pramono mengatakan, KPU mengapresiasi para pihak yang tetap menghormati kewenangan KPU untuk menetapkan hari dan tanggal pemungutan suara. "Seperti bagaimana diatur dalam UU Pemilu Pasal 167 ayat (2) dan Pasal 347 ayat (2)," jelasnya.

Soal tahapan Pemilu 2024, menurutnya, KPU telah mengirimkan surat permohonan konsultasi dalam Forum Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan

DPR untuk membahas Rancangan Peraturan KPU tentang Tahapan, Program dan Jadwal. "Hari ini (Selasa, 30/11) surat sudah diterima di staf Setjen DPR RI," ujar Pramono.

Dalam surat tersebut, Pramono mengatakan, KPU berharap RDP bisa dilaksanakan pada 7 Desember 2021 atau sebelum memasuki masa reses. "Menyesuaikan dengan agenda Kemendagri dan Komisi II DPR," ucapnya. **(Ant)-f**

27 PWNU TEMUI RAIS AAM PBNU

Siap Ikuti Muktamar 17 Desember

JAKARTA (KR) - Puluhan pimpinan Syuriah dan Tanfidziyah dari 27 Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama (PWNU) seluruh Indonesia mendatangi Rais Aam PBNU, KH Miftachul Akhyar. Selain menyatakan mendukung Rais Aam, mereka juga menegaskan siap menjadi peserta dalam Muktamar NU ke-34 pada 17 Desember 2021 di Lampung.

Mereka diterima Rais Aam, Selasa (30/11) di kantor PBNU, Jalan Kramat Raya 164 Jakarta Pusat. Mereka berasal dari PWNU Jatim, Jateng, DIY, Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kalimantan

Timur, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan. Kemudian, Kalimantan Barat, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Maluku, Maluku Utara dan Papua Barat. Tampil sebagai juru bicara adalah Katib Syuriah PWNU Jatim, KH Syafruddin.

Ketua Panitia Daerah Muktamar NU di Lampung dan sekaligus Ketua NU Lampung, Prof Dr KH Moh Mukri menyatakan, sejak tahun 2020, PWNU Lampung sudah siap menjadi tuan rumah dan menyiapkan segala

daya dukung dan fasilitas untuk menyelenggarakan muktamar.

"Apalagi tahun 2021. Tentu dengan tetap menerapkan proses sesuai aturan pemerintah. Setelah pemerintah memberlakukan PPKM Level 3, kami selaku Panitia Daerah sekaligus Pimpinan Wilayah NU bersama 27 Wilayah Provinsi, siap mendukung dan melaksanakan Muktamar NU ke-34 pada 17-19 Desember 2021 sesuai instruksi Rais Aam PBNU," papar Prof Mukri yang juga Rektor UIN Lampung.

Bahkan, lanjutnya, sebelum ada pertemuan dengan para Pimpinan Wilayah NU, Panitia Daerah sudah memantapkan koordinasi. **(Edi/Sim)-f**

Bebas Denda
Pajak Kendaraan Bermotor dan
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
segera berakhir.

sampai
31 Desember 2021

Jangan lewatkan!

Lunas Pajaknya, Sejahtera Rakyatnya

bpkadiy bpkadiy bpkadiy